



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

JL. BRIGJEND. RAJAMIN PURBA, S.H. NO.119, PEMATANG SIANTAR 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL KPPN.PEMATANGSIANTAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEMATANGSIANTAR

Nomor : S-429/WPB.02/KP.04/2020 12 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pembukaan Pendaftaran *E-learning* Bendahara Tahun 2020

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN dan masih terdapatnya Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang belum memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT), serta menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor ND-1561/PB.7/2020 hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai **Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu** pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, **harus memiliki Sertifikat Bendahara.**
2. Terdapat enam Bendahara Satker Mitra Kerja KPPN Pematangsiantar yang belum memiliki Sertifikat Bendahara, yang terdiri dari tiga Bendahara Pengeluaran dan tiga Bendahara Penerimaan sebagaimana daftar terlampir.
3. Adapun persyaratan calon peserta diklat bendahara adalah sebagai berikut:
 - a. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
 - d. Calon peserta harus merupakan Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Satker dan dapat dibuktikan dengan **SK dari Kepala Satker atau Kepala K/L;**
 - e. Apabila terdapat kondisi mendesak (bendahara meninggal/pensiun/mutasi/promosi/cuti hamil) dan diperlukan penggantian bendahara, namun SK Kepala Satker atau Kepala K/L belum dapat dikeluarkan, calon peserta dengan status Calon Bendahara dapat melakukan pendaftaran dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada KPPN Pematangsiantar.

Layanan Kami: Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya

4. Pendaftaran pelatihan bendahara dilakukan dengan melengkapi formulir pendaftaran diklat bendahara pada tautan <http://bit.ly/FORMPENDAFTARANDIKLATBNT>. Pendaftaran pelatihan bendahara dibuka sampai dengan **Jumat, 16 Oktober 2020**.
5. Pengumuman Jadwal Diklat Bendahara dan Usulan Peserta Diklat Bendahara akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya.
6. Disampaikan kembali apabila Bendahara Satker tidak memiliki Sertifikat Bendahara, maka Satker tidak diperkenankan untuk **mengelola Uang Persediaan dan SPM LS Bendahara**. Satker hanya diperkenankan menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga pada seluruh pembayaran yang dilakukan.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk **memastikan** seluruh Bendahara Satker Saudara telah memiliki Sertifikat Bendahara dan **menugaskan** Bendahara Satker yang belum memiliki Sertifikat Bendahara untuk melakukan pendaftaran pelatihan bendahara sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Hanafi

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara



Layanan Kami: Transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya

**BENDAHARA SATUAN KERJA YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT BENDAHARA (BNT)
SAMPAI DENGAN 12 OKTOBER 2020
PADA KPPN PEMATANGSIANTAR**

No.	Nama Satker	Nama Bendahara	Jabatan Bendahara	Keterangan
1	KPU Kab. Simalungun	Rosdiana Damanik	Bendahara Pengeluaran	-
2	Dinas Pertanian Kab. Simalungun	Siti Nurainun	Bendahara Pengeluaran	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Simalungun	Halason Sidabutar	Bendahara Pengeluaran	-
4	Pengadilan Agama Pematangsiantar	Eka Ariyandi	Bendahara Penerimaan	Bendahara memiliki Sertifikat Bendahara Pengeluaran, bukan Bendahara Penerimaan
5	Polres Pematangsiantar	Sarmail Purba	Bendahara Penerimaan	-
6	Polres Simalungun	Puad Pahrudin	Bendahara Penerimaan	-

